



# LAPORAN KINERJA



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2019



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2019 dengan tepat waktu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2019. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2019 menetapkan satu sasaran kegiatan dan tiga indikator kinerja. Secara umum pada tahun anggaran 2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2019. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2019.

**Jakarta, Januari 2020**  
**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan**

**Dra. Sri Hartini, M.Si**



# DAFTAR ISI

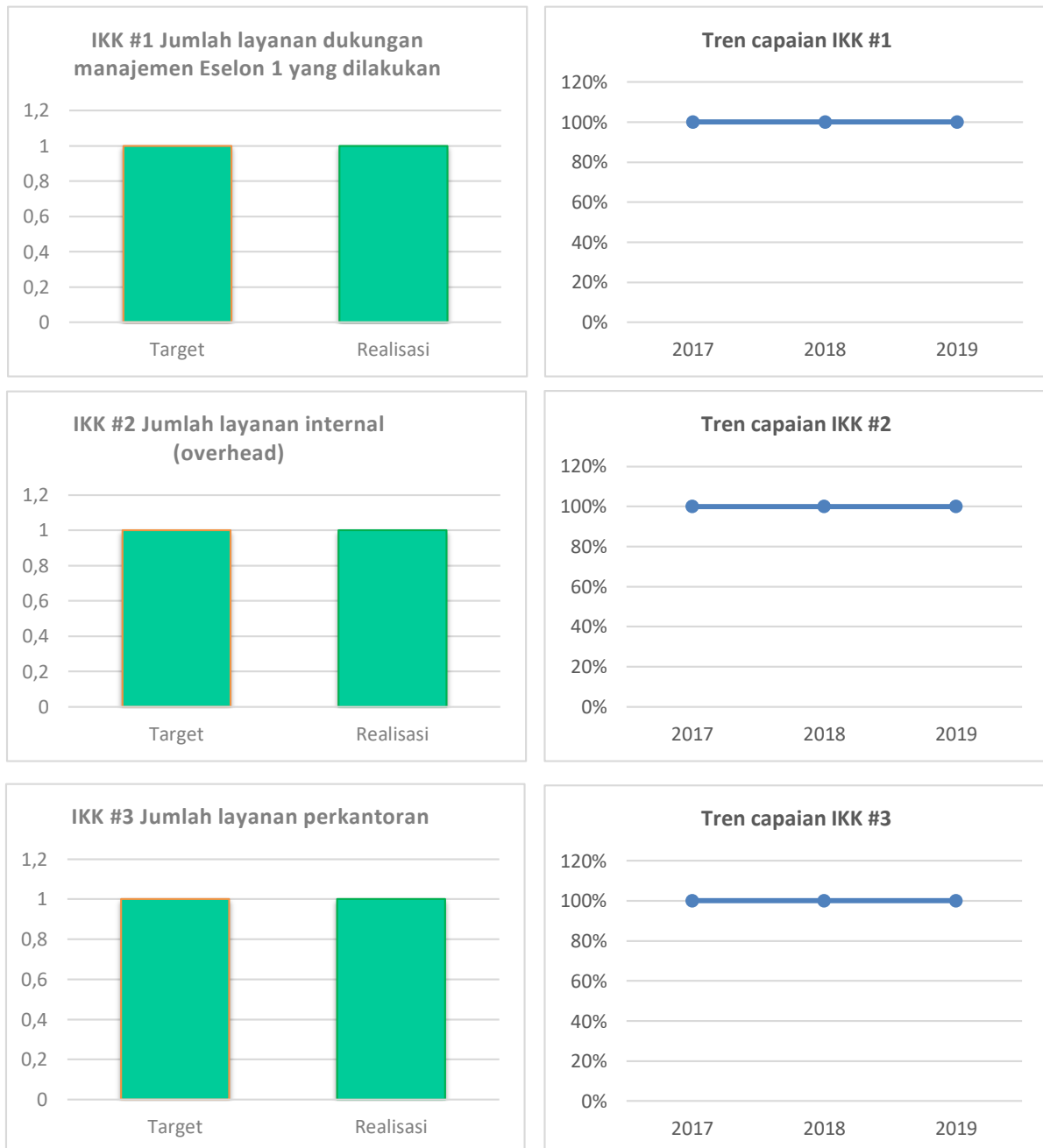
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
IKTISAR EKSEKUTIF.....	2
I. PENDAHULUAN .....	5
A. Gambaran Umum .....	5
B. Dasar Hukum .....	5
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi .....	6
D. Isu-isu Strategis .....	7
II. PERENCANAAN KINERJA .....	9
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	12
B. Realisasi Anggaran .....	25
IV. PENUTUP .....	28
LAMPIRAN .....	30



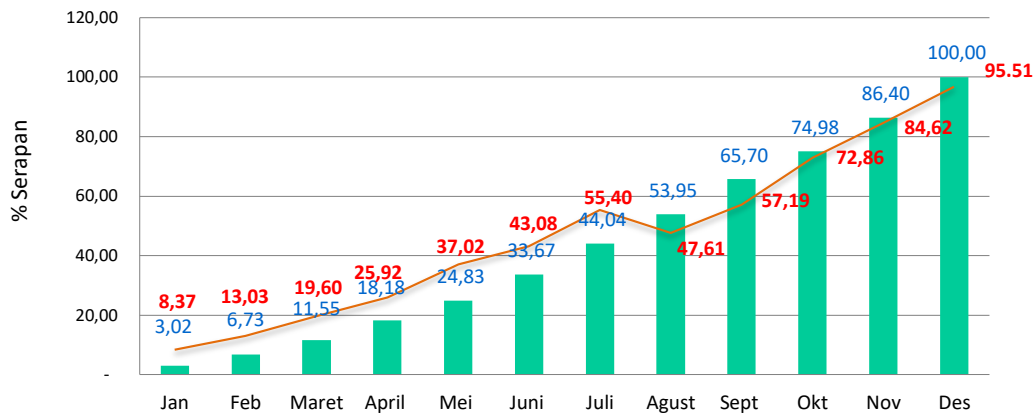
# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 2019 menyajikan tingkat pencapaian satu sasaran kegiatan dengan tiga indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III.

Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.



GRAFIK TARGET DAN REALISASI APBN 2019  
 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan  
 Per Tanggal 14 Januari 2020  
 Sumber Data SP2D



Kinerja Keuangan  
 Setdittjen Kebudayaan

95,51%

Bulan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Target	3.02	6.73	11.55	18.18	24.83	33.67	44.04	53.95	65.70	74.98	86.40	100.00
Realisasi	8.37	13.03	19.60	25.92	37.02	43.08	55.40	47.61	57.19	72.86	84.62	95.51

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Masih belum optimalnya perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2019
2. Terbatasnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia bidang kebudayaan
3. Belum optimalnya pelaksanaan SPI guna pengawasan program dan kegiatan Sekretariat Ditjen Kebudayaan

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Melakukan konsolidasi dan penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan
2. Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia bidang kebudayaan, realokasi sumberdaya manusia sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi, membentuk ekosistem gotong royong melalui kerjasama dengan pihak lain.
3. Mengoptimalkan SPI guna pengawasan program dan kegiatan Sekretariat Ditjen Kebudayaan.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan satuan kerja yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sejak Desember 2017 hingga saat ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh Dra. Sri Hartini, M.Si. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan wilayah kerja sebanyak 39 satuan kerja/upt di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jumlah SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan sebanyak 87 orang Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi mulai dari S2, S1, D3, SMA dan SMP.

Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
S-2	14
S-1	52
D-III	2
SMA	17
SMP	2
<b>Total</b>	<b>87</b>

### B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

7. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud.
8. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

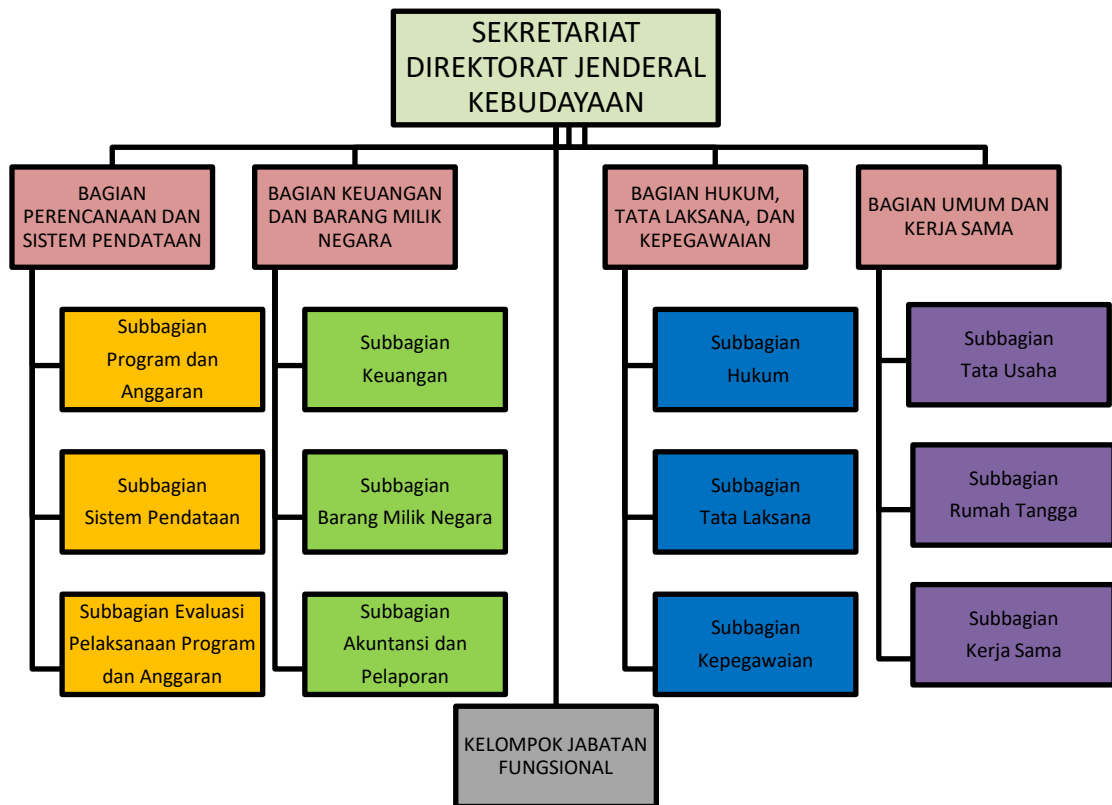
### **C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa tugas pokok Sekretariat Ditjen Kebudayaan adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan;
2. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan;
3. Pengelolaan data dan informasi di bidang kebudayaan;
4. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang kebudayaan;
5. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
6. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
7. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
8. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
9. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan;
10. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan
11. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Adapun struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan seperti pada bagan berikut.



#### D. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:

1. Kurangnya jumlah dan mutu SDM kebudayaan yang berperan aktif melestarikan keragaman budaya bangsa serta memperdalam karakter dan jatidiri bangsa;
2. Kurang merata dan kurang berkeadilannya akses masyarakat pada ekspresi dan kegiatan budaya;
3. Kurangnya kerjasama kebudayaan antar daerah serta antara Indonesia dengan bangsa lain;
4. Kurangnya mutu tata kelola kelembagaan dalam kerja pelestarian budaya.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

---

### **Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2014-2019:**

Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Teknis di Bidang Kebudayaan untuk Penguatan Insan, Ekosistem, Tata Kelola dan Mutu Kelembagaan Kebudayaan

### **Misi:**

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program mewujudkan tujuan pemajuan kebudayaan;
2. Meningkatkan tata kelola keuangan serta pengelolaan barang milik negara yang efisien, transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan program;
3. Membangun payung hukum yang kuat dalam memperkuat kinerja dan sinergi organisasi untuk pemajuan kebudayaan;
4. Meningkatkan tata kelola yang prima dalam urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kerjasama di lingkungan direktorat jenderal kebudayaan.

### **Tujuan Strategis:**

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program pembangunan kebudayaan;
2. Peningkatan kualitas pengembangan data dan statistik bidang kebudayaan;
3. Peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
4. Peningkatan tata kelola dan kualitas layanan di bidang hukum;
5. Peningkatan tata kelola dan kualitas layanan di bidang tata laksana dan kepegawaian;
6. Peningkatan tata kelola dan kualitas layanan di bidang kerjasama dan kehumasan;
7. Peningkatan kualitas pengelolaan di bidang perkantoran (persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan) dan kerumahtanggaan.

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2019. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2019.

*(dalam ribuan)*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
1.	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan	1. Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon 1 yang dilakukan	1 layanan	1 layanan	Rp 294.481.032	Rp 396.547.527
		2. Jumlah layanan internal (overhead)	-	1 layanan		
		3. Jumlah layanan perkantoran	-	1 layanan		





## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan satu sasaran kegiatan dengan tiga indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2019.

#### Sasaran #1 Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Pencapaian keberhasilan dari sasaran kegiatan Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan didukung sebanyak 3 Indikator Kinerja Kegiatan, diantaranya adalah:

##### IKK #1. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon 1 yang dilakukan

Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra 2019	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	%		
1 layanan	1 layanan	1 layanan	100	1 layanan	100

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

#### a. Penyusunan Peraturan Turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Sebagai salah satu bentuk kegiatan layanan dukungan manajemen Eselon 1, layanan bidang Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan penyusunan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan target seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

Tahun	Target	Pencapaian	Keterangan
2019	1. Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. (tercapai)	Masih menunggu surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai selesai harmonisasi, untuk selanjutnya dilakukan pengundangan.
	2. Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Kebudayaan.	Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Kebudayaan. (tercapai)	Masih menunggu hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Kebudayaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
	3. Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.	Pembahasan dan Koordinasi antar Kementerian/Lembaga.	Masih menunggu perbaikan masukan dari Kementerian/ Lembaga, terkait dengan materi muatan dalam Lampiran Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
	4. Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perizinan Pemanfaatan Objek Kebudayaan oleh Industri Besar dan Pihak Asing dan Sanksi Administratifnya.	Pembahasan dan Koordinasi internal Ditjen Kebudayaan	Masih dalam penyusunan pokok-pokok pikiran materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perizinan Pemanfaatan Objek Kebudayaan oleh Industri Besar dan Pihak Asing dan Sanksi Administratifnya.

Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2019 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Layanan Hukum telah menunjukkan keberhasilan kinerja yang dicapai berupa 2 (dua) Naskah Rancangan Peraturan, yaitu:

- a. Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; dan
- b. Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Kebudayaan.

Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) belum tercapai karena sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga. Kendala lainnya terjadi dalam hal pengundangan karena amanat penyusunan Rancangan Perpres tentang RIPK juga

tercantum dalam Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2017. Pencantuman amanat tersebut dilakukan atas permintaan dari Kementerian Sekretariat Negara. Rancangan Perpres tentang RIPK dapat diundangkan apabila Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah diundangkan terlebih dahulu.

Sebagai tindak lanjut, di tahun 2020 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan akan berupaya untuk mengundang kedua Naskah Rancangan Peraturan yang telah selesai dibuat di tahun 2019 dan berupaya untuk menyelesaikan penyusunan naskah Rancangan Peraturan yang belum tercapai di tahun 2019.

Dokumentasi  
Penyusunan Peraturan Turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017  
tentang Pemajuan Kebudayaan



Foto 1 :  
Pembahasan Panitia Antar Kementerian  
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah  
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.



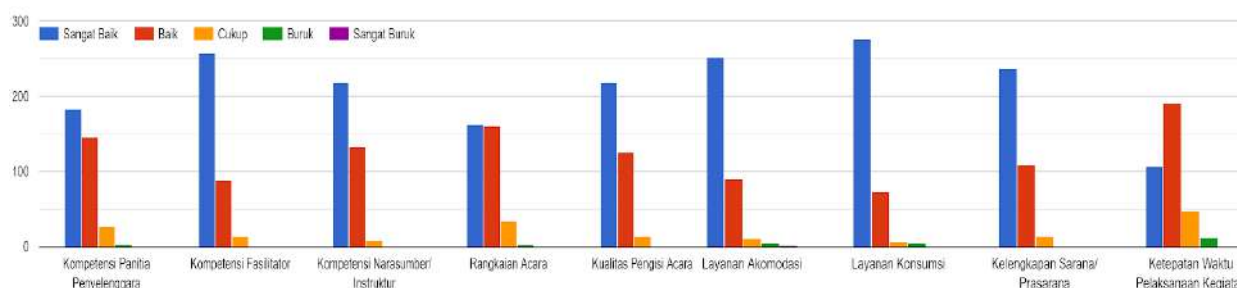
Foto 2:  
Pembahasan Panitia Antar Kementerian  
Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden  
tentang Strategi Kebudayaan.

## **b. Evaluasi Kemah Budaya Kaum Muda 2019**

Kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda menjadi salah satu aksi nyata sebagai tindak lanjut Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 dalam mewujudkan strategi kebudayaan dan rencana aksi pemajuan kebudayaan. kegiatan kemah budaya merupakan aspirasi yang muncul dari kalangan generasi muda pada gelaran Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Kemendikbud langsung menindaklanjuti usulan tersebut sebagai forum khusus anak muda yang memiliki tujuan bersama memajukan kebudayaan Indonesia.

Untuk itu Sekretariat Ditjen Kebudayaan melalui Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan melakukan kegiatan Evaluasi Kemah Budaya Kaum Muda dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana umpan balik yang dirasakan peserta Kemah Budaya Kaum Muda 2019 untuk menjadi catatan dan perbaikan di masa yang akan datang. Adapun hasil dari evaluasi tersebut adalah :

Aspek Penilaian



Untuk aspek penilaian dari 9 kriteria (Kompetensi Panitia Penyelenggara, Kompetensi Fasilitator, Kompetensi Narasumber/Instruktur, Rangkaian Acara, Kualitas Pengisi Acara, Layanan Akomodasi, Layanan Konsumsi, Kelengkapan Sarpras, dan Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan) semua sudah dirasa sangat baik.

### c. Evaluasi Pekan Kebudayaan Nasional Tahun 2019

Pekan Kebudayaan Nasional merupakan wujud implementasi dari agenda strategi pemajuan kebudayaan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) tahun 2018. Diharapkan dari kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional bisa menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang lebih inklusif mulai dari masyarakat, komunitas, sampai pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Untuk itu Sekretariat Ditjen Kebudayaan melalui Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan melakukan Survey Evaluasi Pekan Kebudayaan Nasional Tahun 2019 dengan tujuan mengetahui sampai sejauh mana dampak kepuasan pengunjung terhadap kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional dan menjadi perbaikan di masa yang akan datang.

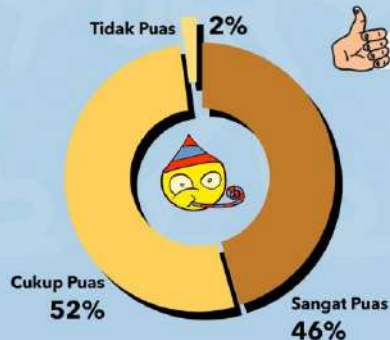


#### INFOGRAFIS

## INDEKS KEPUASAN PENGUNJUNG PEKAN KEBUDAYAAN NASIONAL



Survey Indeks Kepuasan Pengunjung dilakukan selama kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional berlangsung. Dengan populasi sebanyak **203.245 pengunjung**, margin of error yang ditetapkan 2,5% maka didapat jumlah responden **1.588 pengunjung**.



### Indeks Kepuasan Pengunjung

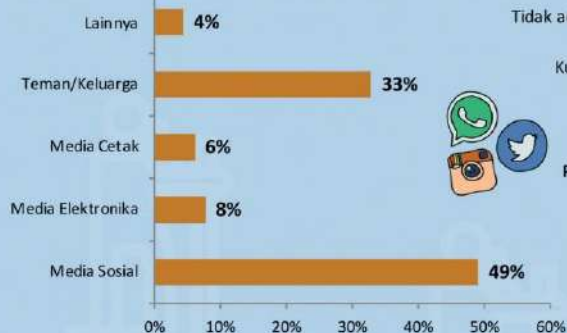


Sedangkan secara prosentase, **46% pengunjung Sangat Puas**, 52% pengunjung menyatakan Puas dan hanya 2% pengunjung yang menyatakan Tidak Puas dengan gelaran Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2019.

Dari hasil penilaian pengunjung terhadap acara Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2019 diperoleh **indeks nilai rata-rata 8,31** (skala 1-10) dengan indeks tertinggi ada pada hari terakhir yaitu 8,64.



### Asal Pengunjung Mendapat Informasi



Mayoritas pengunjung mendapatkan informasi mengenai adanya kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional dari **Media Sosial sebesar 49%**, dari Teman atau Keluarga sebesar 33%, sedangkan sisanya dari Media Elektronik (8%), Media Cetak (6%) dan Lainnya (4%).



### Minat Pengunjung terhadap Konten Acara



Dari seluruh konten acara pada kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional, konten Pertunjukan atau Pertunjukan menjadi yang paling menarik minat pengunjung. Namun jika dilihat sebarannya, seluruh konten yang ditawarkan merata menarik minat pengunjung.



Pekan  
Kebudayaan  
Nasional



#IndonesiaBahagia





#### d. Platform Indonesiana

Pada tahun 2019 festival Indonesiana dilaksanakan di 18 lokasi dengan 17 festival. Berikut adalah 18 lokasi dan 17 festival: Festival Sindoro Sumbing, Festival Panji, Festival Lamaholot, Jakarta Literary Festival, Festival Seni Multatuli, Charitra Majapahit, Silek Art Festival, Jogja Literary festival, Festival Reyog, Festival Saman, Multatuli Festival, Festival Cerita Dari Blora, Festival Fohorai, Festival Rera Tumding, Festival Danau Ranau, serta Festival Inerie, Festival Pesta Kolintang Tomohon.

Tahun	Target	Pencapaian	Ket.
2019	17 Festival	17 Festival	Target tercapai

Berdasarkan tabel diatas, tahun 2019 Sekretariat Ditjen Kebudayaan melalui Layanan Umum dan Kerjasama telah berhasil mencapai target pelaksanaan Festival Indonesiana. Adapun tindak lanjut kedepannya tahun 2020 Sekretariat Ditjen Kebudayaan berupaya untuk meningkatkan jumlah dan lokasi festival.

#### Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Program INDONESIA



#### e. Pekan Kebudayaan Nasional

Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) dilaksanakan di Istora Senayan pada tanggal 7 s.d 13 Oktober 2019. Dalam rangkaian PKN telah diselenggarakan 10 kompetisi permainan dan olah raga tradisional, 36 sesi konferensi, 125 penampil dan pertunjukan, 27 pameran seni, serta 10 lokakarya budaya. Pada tahun 2019, Sekretariat Ditjen Kebudayaan melalui proram PKN telah berhasil melampaui target pelaksanaan seperti dalam tabel. Selain itu hadir pula sebanyak 9.356 tamu undangan dan 4.324 peserta pawai budaya.

Tahun	Target	Pencapaian	Ket.
2019	100.000 pengunjung	203.245 pengunjung	Target tercapai

Dokumentasi

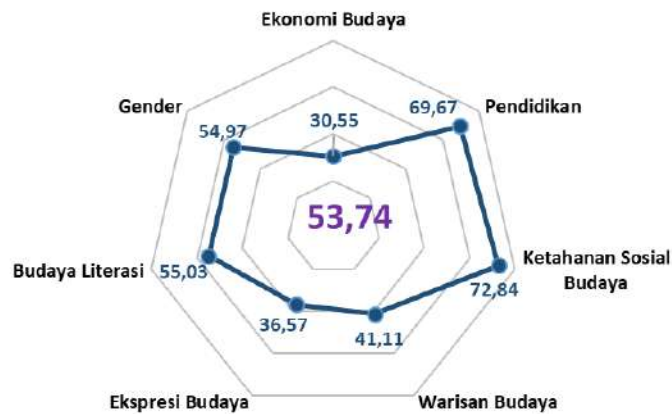
Kegiatan Pelaksanaan Program INDONESIA



#### f. Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian pemajuan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja tata kelola dalam pemajuan kebudayaan. Penyusunan IPK juga menjadi salah satu bentuk gotong-royong dalam upaya pemajuan kebudayaan, karena dilaksanakan atas kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kementerian PPN/Bappenas serta Badan Pusat Statistik.

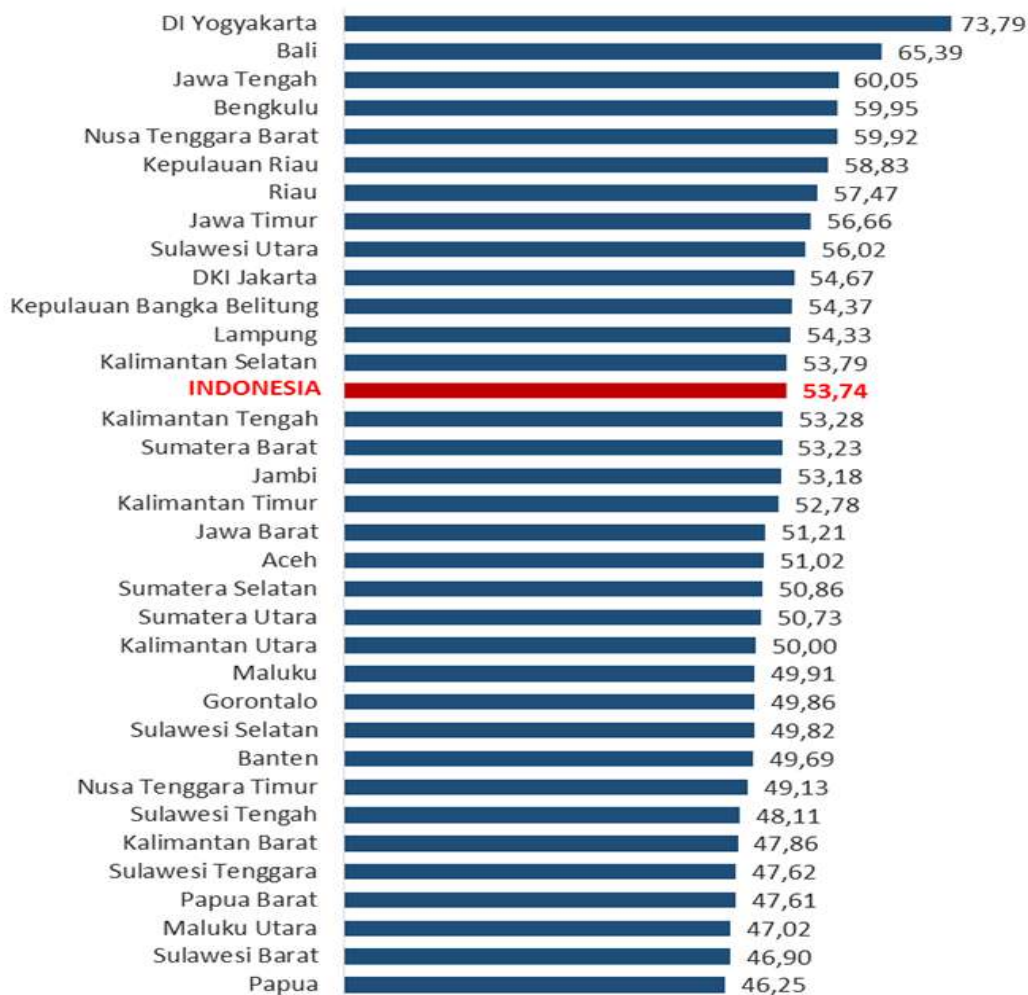
Berdasarkan penghitungan IPK 2018 yang disusun pada tahun 2019 sebagaimana yang tersaji pada gambar di bawah, capaian IPK Indonesia berada pada nilai sebesar 53,74 dari rentang nilai 0 sampai dengan 100. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di Indonesia masih membutuhkan usaha dan kerja keras dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna mencapai hasil yang optimal.



Jika melihat pada dimensi yang dihasilkan, masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara dimensi satu dengan lainnya. Dua dimensi dengan hasil tertinggi adalah dimensi ketahanan nasional (72,84) dan dimensi pendidikan (69,67). Tingginya nilai pada dimensi ketahanan sosial budaya menunjukkan cukup baiknya kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Sedangkan dimensi ekonomi budaya menghasilkan nilai indeks terendah (30,55) yang menandakan bahwa masih cukup rendahnya aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).

Selanjutnya jika dilihat nilai IPK 2018 menurut provinsi sebagaimana yang tersaji pada grafik di bawah, terdapat 13 provinsi yang menghasilkan nilai IPK di atas angka nasional, sedangkan sisanya berada di bawah angka nasional. Tiga provinsi dengan capaian IPK tertinggi adalah DI Yogyakarta (73,79), Bali (65,39) dan Jawa Tengah (60,05). Sedangkan tiga provinsi dengan capaian IPK terendah adalah Papua (46,25), Sulawesi Barat (46,90), dan Maluku Utara (47,02).





Grafik Nilai IPK 2018 tingkat Provinsi

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan IPK 2018, sepanjang bulan November 2019 Kementerian PPN/Bappenas telah menginisiasi serangkaian diskusi untuk menentukan target IPK yang akan dicantumkan dalam target akhir 2024 pada RPJMN 2020-2024 yaitu sebesar 62,69. Meskipun demikian, terdapat beberapa catatan dan kendala yang perlu diperhatikan dalam usaha untuk mencapai target tersebut:

- Perlu adanya kerja sama lintas sektor di tingkat pusat untuk meningkatkan capaian dimensi dan indikator IPK, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.
- Perlu adanya pemahaman serta kerja sama dengan pemerintah daerah, agar turut serta meningkatkan capaian dimensi dan indikator IPK sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- Tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan konsep dimensi dan indikator IPK, khususnya dalam Dimensi Tata Kelola Budaya sebagai satu-satunya dimensi yang tidak dapat dihitung dalam IPK 2018, serta Dimensi Ekonomi Budaya yang indikatornya masih kurang relevan secara substansial.

Untuk menghadapi kendala tersebut, rencana antisipasi yang telah dipersiapkan Direktorat Jenderal Kebudayaan sehubungan dengan upaya mencapai target tersebut antara lain:

- a. Memastikan pelaksanaan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) sebagai acuan pembagian tugas dan wewenang pemajuan kebudayaan lintas sektor. Sebagai catatan, RIPK telah selesai disusun sepanjang tahun 2019 di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- b. Melakukan sosialisasi hasil IPK 2018 kepada pemerintah daerah Provinsi di Indonesia, sekaligus memastikan pelaksanaan kebijakan pembangunan kebudayaan berdasarkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi yang telah disusun, untuk mendukung capaian IPK Provinsi.
- c. Direktorat Jenderal Kebudayaan tetap akan melakukan kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik untuk menyempurnakan konsep IPK agar semakin kuat dan relevan untuk mengukur tata kelola pemajuan kebudayaan.



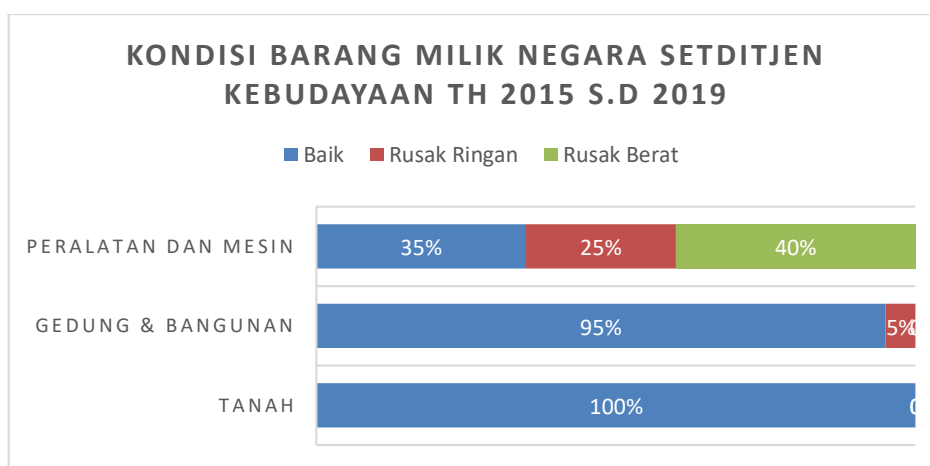
Peluncuran Indeks Pembangunan Kebudayaan di Jakarta, 10 Oktober 2019

## IKK #2. Jumlah Layanan Internal Overhead

Tahun 2019			Target Akhir Renstra 2019	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2019
Target	Realisasi	%		
1 layanan	1 layanan	100	1 layanan	100

Layanan Internal Overhead Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dilakukan dengan pengadaan dan perawatan Barang Milik Negara. Pada tahun 2019 Sekretariat Ditjen Kebudayaan telah melakukan pengadaan Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin sebanyak 251 unit. Dari jumlah tersebut sebagian besar pengadaan berupa alat pengolah data mengingat tingkat penggunaan yang tinggi dalam kegiatan perkantoran.

Dari seluruh Barang Milik Negara yang dimiliki, Kondisi BMN dapat dikelompokkan dalam beberapa klasifikasi, yaitu Kondisi Baik, Kondisi Rusak Ringan, dan Kondisi Rusak Berat.



Dari tabel di atas dapat kita ketahui kondisi sarana dan prasarana (BMN) dalam kondisi baik berupa tanah 100%, Gedung dan Bangunan 95%, serta Peralatan dan Mesin sejumlah 35%. Sedangkan sarana dan prasarana dalam kondisi rusak ringan terdapat pada Gedung dan Bangunan sejumlah 5% dan Peralatan dan Mesin 25%. Kondisi rusak berat sejumlah 40% terjadi pada sarana dan prasarana berupa Peralatan dan Mesin saja.

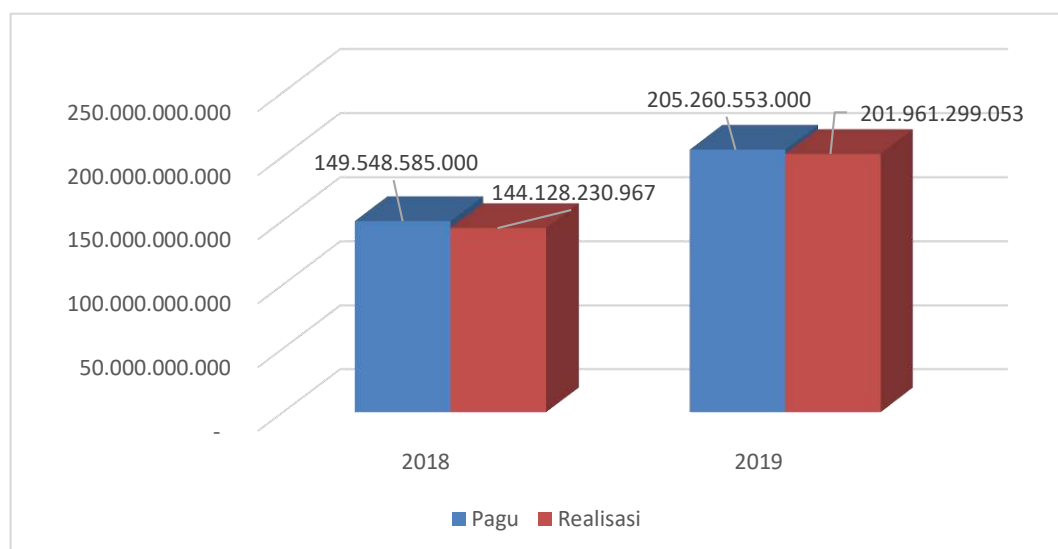
### IKK #3. Jumlah Layanan Perkantoran

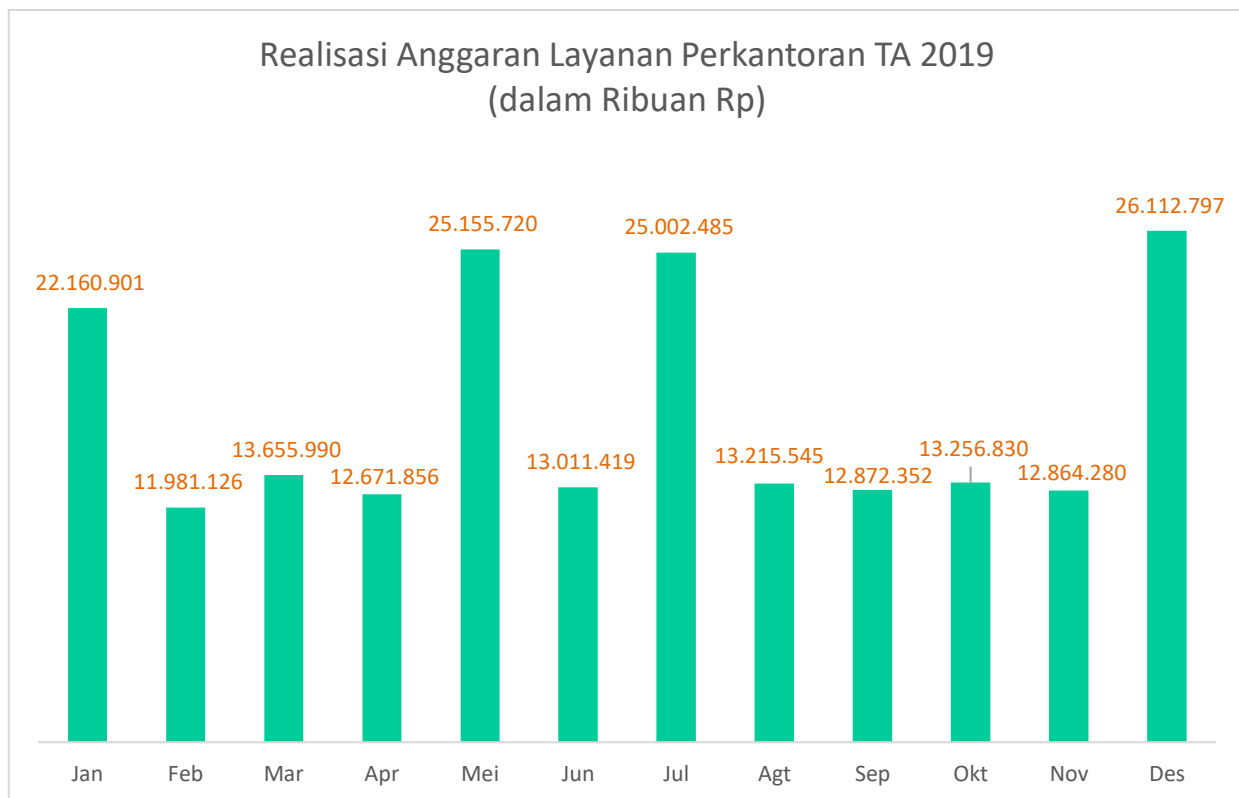
Tahun 2019			Target Akhir Renstra 2019	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2019
Target	Realisasi	%		
1 layanan	1 layanan	100	1 layanan	100

Layanan bulanan Sekretariat Ditjen Kebudayaan dinilai berdasarkan tingkat kepuasan layanan perkantoran yang mencakup pembayarangaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional, dan pemeliharaan perkantoran. Dengan adanya layanan perkantoran yang tepat sasaran dan tepat waktu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para pegawai.

Dari tabel di atas dapat diketahui Sekretariat Ditjen Kebudayaan telah berhasil memenuhi target “Layanan Perkantoran (12 bulan)” sebesar 100% selama tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa layanan perkantoran di Sekretariat Ditjen Kebudayaan berjalan dengan lancar.

Alokasi pagu anggaran terkait dengan Layanan Perkantoran (12 bulan) adalah sebesar Rp. 205.260.553.000 dengan jumlah realisasi mencapai 98% atau sebesar Rp 201.961.299.053 seperti tampak pada tabel dan grafik berikut.

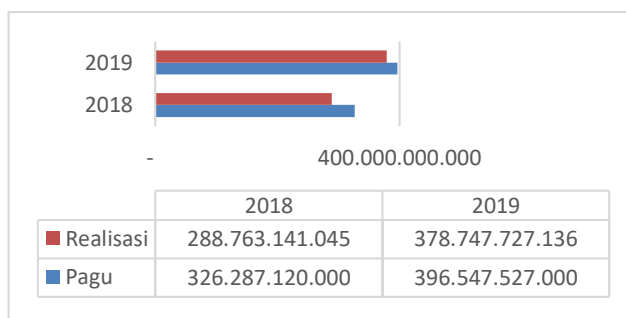




Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi pencairan anggaran mengalami kenaikan cukup tinggi pada bulan Januari, Mei, Juli, dan Desember. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran rapelan tunjangan kerja pada tahun 2018 yang dibayarkan pada Januari 2019. Kenaikan pada bulan Mei dan Juli terjadi karena pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk seluruh pegawai. Sedangkan pada Desember 2019 peningkatan pencairan anggaran terjadi karena pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2019.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam DIPA tahun 2019 sebesar Rp 396.547.527.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp 378.747.727.136 dengan persentase daya serap sebesar 95,51% melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 95,30%. Dibandingkan dengan tahun 2018, persentase realisasi anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,01%.



Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian satu sasaran kegiatan dengan tiga indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Daya Serap
Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan	1. Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon 1 yang dilakukan	Rp 186.309.221.000	Rp 173.561.820.795	93 %
	2. Jumlah layanan internal (overhead)	Rp 4.977.753.000	Rp 4.668.585.568	94 %
	3. Jumlah layanan perkantoran	Rp 205.260.553.000	Rp 201.961.299.053	98 %

Adapun rincian realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut.

IKK	Pagu Anggaran (Rp)			Realisasi Anggaran (Rp)		
	B.Pegawai	B.Barang	B.Modal	B.Pegawai	B.Barang	B.Modal
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	-	186.309.221.000	-	-	173.561.820.795	-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	40.000.000	4.937.753.000	-	-	4.668.585.568
Layanan Perkantoran	192.025.832.000	13.234.721.000	-	190.285.957.928	11.675.341.125	-
<b>Total</b>	192.025.832.000	199.583.492.000	4.937.753.000	190.285.957.928	185.237.161.920	4.668.585.568

Pada tahun 2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 104.098.748.000. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari sisa anggaran satuan kerja di bawah lingkungan Ditjen Kebudayaan yang kemungkinan tidak terserap. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti Pekan Kebudayaan Nasional, Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kebudayaan.



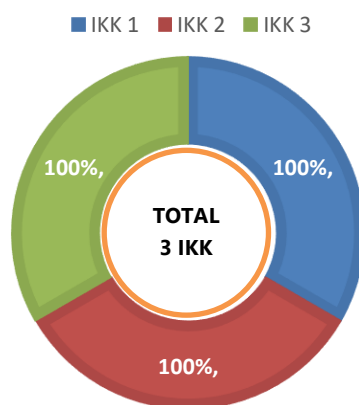


## BAB IV

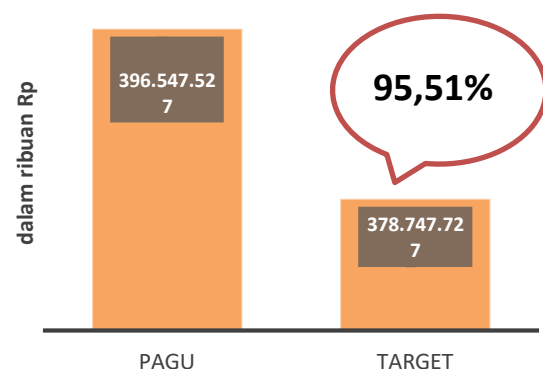
# PENUTUP

Selama tahun 2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

### Capaian Indikator Kinerja



### Kinerja keuangan Setditjenbud 2019



Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Menjalankan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal perencanaan awal, sehingga mempengaruhi realisasi anggaran yang tidak seimbang dengan realisasi output kinerja.
2. Masih belum maksimal peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia bidang kebudayaan dilingkungan Sekretariat Ditjen Kebudayaan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan SPI guna pengawasan program dan kegiatan Sekretariat Ditjen Kebudayaan

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal perencanaan awal
2. Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia bidang kebudayaan, realokasi sumberdaya manusia sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.
3. Mengoptimalkan SPI guna pengawasan program dan kegiatan Sekretariat Ditjen Kebudayaan



# LAMPIRAN

---

- *Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (awal)*
- *Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (revisi)*
- *Pengukuran Kinerja Tahun 2019*



**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**  
**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal Kebudayaan**

**A. TUGAS**

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

**B. FUNGSI DAN TARGET CAPAIAN**

**PROGRAM : PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

**KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA**

(dalam ribuan)

NO	FUNGSI	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan;	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 yang dilakukan	1	Rp 294.481.032
2	Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan				
3	Pengelolaan data dan informasi di bidang kebudayaan				
4	koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang kebudayaan				
5	koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal				
6	penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal				
7	pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal				
8	pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal				
9	koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan				
10	pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal				

11	pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal				
----	--	--	--	--	--

Jumlah Alokasi anggaran Tahun 2019 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan sebesar Rp. 294,481,032,000,- (Dua ratus sembilan puluh empat milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga puluh dua ribu rupiah)

**C. Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2019 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan.**



Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Oktr	Nov	Des
Penyerapan Bulanan (jutaan)	8,893	10,925	14,194	13,524	15,563	26,032	30,538	29,183	34,602	24,983	36,575	26,309
Penyerapan Kumulatif	8,893	19,819	34,013	53,537	75,120	99,152	129,690	158,873	193,474	217,857	254,432	280,640
% penyerapan	3.02%	6.73%	11.55%	18.18%	24.83%	33.67%	44.04%	53.95%	65.70%	73.98%	86.40%	95.30%

**EVALUASI**

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Februari 2019

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan,

Hilmar Farid

Sri Martini



Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2019  
Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Direktur Jenderal  
Kebudayaan

**Tugas**

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

**Target Capaian**

Program Pelestarian Budaya



1912161200139

Halaman 1 dari 3



Fungsi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Esselon 1 yang dilakukan	1 Layanan
koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan		2. Jumlah Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan
pengelolaan data dan informasi di bidang kebudayaan		3. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang kebudayaan			
koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal			
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal			
pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal			
pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal			
koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan			
pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal			

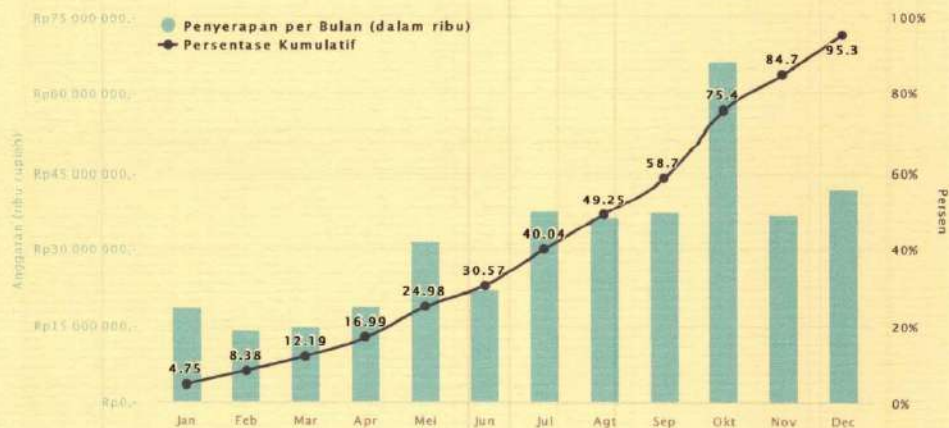
Total Jumlah Anggaran Kegiatan "Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan" sebesar Rp396.547.527.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran kinerja sebesar Rp191.286.974.000,- dan anggaran kegiatan yang bersifat pendukung/rutin sebesar Rp205.260.553.000,-.



1912161200139

Halaman 2 dari 3

### RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019



Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penyerapan Bulanan	18.816.008	14.384.675	15.108.461	15.034.281	17.584.147	22.167.007	37.553.051	36.522.037	37.475.741	66.223.437	35.078.300	42.034.038
Penyerapan Kumulatif	18.816.008	33.230.683	48.339.144	63.373.425	80.957.572	103.124.579	140.677.630	177.199.667	214.675.408	280.898.845	315.977.145	357.991.183
Persentase Kumulatif	4,75	8,38	12,19	16,99	24,98	30,57	40,04	49,25	58,7	75,4	84,7	95,3

#### EVALUASI

Bagi setiap unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Kebudayaan

(Hilmar Farid, PhD)

Jakarta, Desember 2019

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan

(Dra. Sri Hartini, M.Si)



Lampiran: Pengukuran Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Terselenggara nya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan	4. Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon 1 yang dilakukan	1 layanan	Rp 186.309.221.000	1 layanan	Rp 173.561.820.795
	5. Jumlah layanan internal (overhead)	1 layanan	Rp 4.977.753.000	1 layanan	Rp 4.668.585.568
	6. Jumlah layanan perkantoran	1 layanan	Rp205.260.553.000	1 layanan	Rp 201.961.299.053





DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN